

2 rangkap



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG :

TATA CATA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara Pengalokasian, penggunaan pemantauan dan pevaluasi dana desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Enrekang TA 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 56);
 11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN ENREKANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa (IKG).

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten;
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten;
- Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa kabupaten;
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten/kota;
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
 - b. foto copy RPJM Desa dan RKP Desa Tahun berjalan beserta lampirannya

- c. surat pernyataan tanggungjawab
 - d. pakta integritas
 - e. foto copy Rekening Desa
 - f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- (5) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan f kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret
 - (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban Tahap Pertama.
 - (7) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 8

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 9

Keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Enrekang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Enrekang

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal, 19 APRIL 2017

BUPATI ENREKANG,


MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CATA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
 DANA DESA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017

PAGU DANA DESA KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)	
I	KEC. MAIWA	15,129,282,000															1,370,093,498	16,499,378,000
1	PATONDON SALU	720,442,000	2108	1.424%	0.356%	92	0.143%	0.050%	28.61	1.72%	0.17%	26.38	0.627%	0.188%	0.77%		64,644,646	785,087,000
2	TUNCUNG	720,442,000	1278	0.863%	0.216%	294	0.456%	0.159%	6.62	0.40%	0.04%	41.37	0.984%	0.295%	0.71%		59,931,030	780,373,000
3	PASANG	720,442,000	801	0.541%	0.135%	404	0.626%	0.219%	10.69	0.64%	0.06%	26.57	0.632%	0.190%	0.61%		51,321,587	771,764,000
4	SALODUA	720,442,000	1151	0.777%	0.194%	181	0.280%	0.098%	20.13	1.21%	0.12%	38.45	0.915%	0.274%	0.69%		58,049,286	778,491,000
5	BATU MILA	720,442,000	1565	1.057%	0.264%	877	1.359%	0.476%	10.61	0.64%	0.06%	39.73	0.945%	0.284%	1.09%		91,738,295	812,180,000
6	PUNCAK HARAPAN	720,442,000	756	0.511%	0.128%	227	0.352%	0.123%	14.08	0.85%	0.08%	29.68	0.706%	0.212%	0.55%		46,174,128	766,616,000
7	PALAKKA	720,442,000	591	0.399%	0.100%	392	0.607%	0.213%	28.62	1.72%	0.17%	35.36	0.841%	0.252%	0.74%		62,172,797	782,615,000
8	TAPONG	720,442,000	831	0.561%	0.140%	531	0.823%	0.288%	17.36	1.04%	0.10%	39.38	0.937%	0.281%	0.81%		68,659,373	789,101,000
9	MANGKAWANI	720,442,000	1073	0.725%	0.181%	906	1.404%	0.491%	12.50	0.75%	0.08%	38.90	0.925%	0.278%	1.03%		86,516,509	806,959,000
10	BOTTO MALANGGA	720,442,000	2234	1.509%	0.377%	559	0.866%	0.303%	23.75	1.43%	0.14%	23.31	0.554%	0.166%	0.99%		83,496,537	803,939,000
11	BOIYA	720,442,000	854	0.577%	0.144%	323	0.500%	0.175%	24.56	1.48%	0.15%	40.07	0.953%	0.286%	0.75%		63,540,434	783,982,000
12	MATAJANG	720,442,000	1035	0.699%	0.175%	642	0.995%	0.348%	48.82	2.94%	0.29%	38.30	0.911%	0.273%	1.09%		91,958,244	812,400,000
13	BARINGIN	720,442,000	1006	0.679%	0.170%	365	0.566%	0.198%	20.74	1.25%	0.12%	34.13	0.812%	0.244%	0.74%		62,110,890	782,553,000
14	LEBANI	720,442,000	827	0.558%	0.140%	789	1.222%	0.428%	17.70	1.06%	0.11%	33.48	0.796%	0.239%	0.91%		77,032,632	797,475,000
15	LIMBUANG	720,442,000	266	0.180%	0.045%	86	0.133%	0.047%	5.22	0.31%	0.03%	39.82	0.947%	0.284%	0.41%		34,350,558	754,795,000
16	PALADANG	720,442,000	875	0.591%	0.148%	701	1.086%	0.380%	10.44	0.63%	0.06%	50.08	1.191%	0.357%	0.95%		79,997,270	800,439,000
17	PARIWANG	720,442,000	502	0.339%	0.085%	155	0.240%	0.084%	10.33	0.62%	0.06%	36.72	0.873%	0.262%	0.49%		41,596,041	762,038,000
18	KALUPPANG	720,442,000	652	0.440%	0.110%	295	0.457%	0.160%	13.17	0.79%	0.08%	52.19	1.241%	0.372%	0.72%		60,896,227	781,338,000
19	ONGKO	720,442,000	870	0.588%	0.147%	321	0.497%	0.174%	11.31	0.68%	0.07%	44.29	1.054%	0.316%	0.71%		59,496,478	779,938,000
20	TANETE	720,442,000	516	0.348%	0.087%	163	0.253%	0.088%	18.58	1.12%	0.11%	57.07	1.357%	0.407%	0.69%		58,602,630	779,045,000
21	LABUKU	720,442,000	698	0.471%	0.118%	393	0.609%	0.213%	15.53	0.93%	0.09%	53.14	1.264%	0.379%	0.80%		67,807,907	788,250,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)
II	KEC. ENREKANG	8,645,304,000														1,081,938,971	9,727,242,000
22	RANGA	720,442,000	1035	0.699%	0.175%	1165	1.805%	0.632%	23.98	1.44%	0.14%	44.45	1.057%	0.317%	1.27%	106,991,142	827,433,000
23	BUTTU BATU	720,442,000	1591	1.074%	0.269%	775	1.201%	0.420%	31.50	1.89%	0.19%	29.07	0.691%	0.207%	1.09%	91,618,122	812,060,000
24	TOKKONAN	720,442,000	520	0.351%	0.088%	664	1.029%	0.360%	21.23	1.28%	0.13%	57.49	1.368%	0.410%	0.99%	83,188,718	803,631,000
25	KARUENG	720,442,000	1800	1.216%	0.304%	1097	1.700%	0.595%	8.40	0.51%	0.05%	45.10	1.073%	0.322%	1.27%	107,267,118	827,709,000
26	TALLU BAMBA	720,442,000	2042	1.379%	0.345%	1234	1.912%	0.669%	43.44	2.61%	0.26%	44.03	1.047%	0.314%	1.59%	134,115,257	854,557,000
27	TUNGKA	720,442,000	1600	1.080%	0.270%	261	0.404%	0.142%	31.18	1.87%	0.19%	26.59	0.632%	0.190%	0.79%	66,568,337	787,010,000
28	KALUPPINI	720,442,000	1089	0.735%	0.184%	841	1.303%	0.456%	13.30	0.80%	0.08%	39.22	0.933%	0.280%	1.00%	84,364,538	804,807,000
29	TOBALU	720,442,000	811	0.548%	0.137%	1088	1.686%	0.590%	17.68	1.06%	0.11%	58.46	1.391%	0.417%	1.25%	105,518,454	825,960,000
30	CEMBA	720,442,000	1166	0.787%	0.197%	331	0.513%	0.179%	9.20	0.55%	0.06%	35.65	0.848%	0.254%	0.69%	57,892,514	778,335,000
31	TEMBAN	720,442,000	830	0.560%	0.140%	428	0.663%	0.232%	13.54	0.81%	0.08%	30.03	0.714%	0.214%	0.67%	56,366,301	776,808,000
32	ROSOAN	720,442,000	1111	0.750%	0.188%	1200	1.859%	0.651%	13.00	0.78%	0.08%	38.77	0.922%	0.277%	1.19%	100,686,003	821,128,000
33	LEMBANG	720,442,000	781	0.527%	0.132%	723	1.120%	0.392%	13.50	0.81%	0.08%	60.28	1.434%	0.430%	1.04%	87,362,467	807,804,000
III	KEC. BARAKA	8,645,304,000														914,491,590	9,559,795,000
34	BANTI	720,442,000	1584	1.070%	0.267%	890	1.379%	0.483%	7.36	0.44%	0.04%	27.41	0.652%	0.196%	0.99%	83,536,346	803,978,000
35	BONTONGAN	720,442,000	2704	1.826%	0.456%	876	1.357%	0.475%	22.74	1.37%	0.14%	26.46	0.629%	0.189%	1.26%	106,084,227	826,526,000
36	SALUKANAN	720,442,000	1168	0.789%	0.197%	644	0.998%	0.349%	17.16	1.03%	0.10%	24.55	0.584%	0.175%	0.82%	69,602,538	790,045,000
37	PARINDING	720,442,000	1528	1.032%	0.258%	1064	1.649%	0.577%	6.39	0.38%	0.04%	30.86	0.734%	0.220%	1.09%	92,288,815	812,731,000
38	TIROWALI	720,442,000	978	0.660%	0.165%	490	0.759%	0.266%	5.60	0.34%	0.03%	40.60	0.966%	0.290%	0.75%	63,645,242	784,087,000
39	PEPANDUNGAN	720,442,000	1267	0.856%	0.214%	72	0.112%	0.039%	19.15	1.15%	0.12%	38.84	0.924%	0.277%	0.65%	54,450,172	774,892,000
40	KENDENAN	720,442,000	1284	0.867%	0.217%	1291	2.000%	0.700%	18.82	1.13%	0.11%	26.32	0.626%	0.188%	1.22%	102,769,222	823,211,000
41	PERANGIAN	720,442,000	936	0.632%	0.158%	420	0.651%	0.228%	3.71	0.22%	0.02%	40.39	0.961%	0.288%	0.70%	58,760,432	779,202,000
42	JANGGURARA	720,442,000	1173	0.792%	0.198%	415	0.643%	0.225%	11.37	0.68%	0.07%	30.61	0.728%	0.218%	0.71%	59,904,379	780,346,000
43	KADINGEH	720,442,000	1264	0.854%	0.213%	921	1.427%	0.499%	12.13	0.73%	0.07%	37.26	0.886%	0.266%	1.05%	88,750,009	809,192,000
44	BONEBONE	720,442,000	839	0.567%	0.142%	338	0.524%	0.183%	19.16	1.15%	0.12%	39.58	0.941%	0.282%	0.72%	60,976,691	781,419,000
45	PANDUNG BATU	720,442,000	1172	0.791%	0.198%	722	1.119%	0.392%	2.75	0.17%	0.02%	37.51	0.892%	0.268%	0.87%	73,723,517	794,166,000
IV	KEC. ANGGERAJA	8,645,304,000														708,854,741	9,354,159,000
46	BAMBA PUANG	720,442,000	1976	1.334%	0.334%	366	0.567%	0.198%	9.20	0.55%	0.06%	22.67	0.539%	0.162%	0.75%	63,219,137	783,661,000
47	SIAMBO	720,442,000	1051	0.710%	0.177%	339	0.525%	0.184%	6.51	0.39%	0.04%	26.85	0.639%	0.192%	0.59%	49,957,829	770,400,000
48	MAMPU	720,442,000	1408	0.951%	0.238%	751	1.164%	0.407%	10.64	0.64%	0.06%	29.11	0.693%	0.208%	0.92%	77,358,133	797,800,000
49	PEKALOBAN	720,442,000	1912	1.291%	0.323%	258	0.400%	0.140%	9.92	0.60%	0.06%	27.59	0.656%	0.197%	0.72%	60,696,324	781,138,000
50	SINGKI	720,442,000	1567	1.058%	0.265%	446	0.691%	0.242%	12.08	0.73%	0.07%	25.05	0.596%	0.179%	0.76%	63,946,269	784,388,000
51	SALU DEWATA	720,442,000	954	0.644%	0.161%	474	0.734%	0.257%	13.15	0.79%	0.08%	38.84	0.924%	0.277%	0.77%	65,340,985	785,783,000
52	TINDALUN	720,442,000	750	0.506%	0.127%	139	0.215%	0.075%	12.18	0.73%	0.07%	35.72	0.850%	0.255%	0.53%	44,733,981	765,176,000
53	BUBUN LAMBA	720,442,000	1297	0.876%	0.219%	314	0.487%	0.170%	4.33	0.26%	0.03%	27.91	0.664%	0.199%	0.61%	51,850,117	772,292,000
54	TAMPO	720,442,000	1009	0.681%	0.170%	519	0.804%	0.281%	7.45	0.45%	0.04%	36.57	0.870%	0.261%	0.76%	63,926,528	784,369,000
55	BATUNONI	720,442,000	2330	1.573%	0.393%	241	0.373%	0.131%	5.05	0.30%	0.03%	37.73	0.897%	0.269%	0.82%	69,503,612	789,946,000
56	SARURAN	720,442,000	983	0.664%	0.166%	436	0.676%	0.236%	4.10	0.25%	0.02%	26.32	0.626%	0.188%	0.61%	51,887,839	772,330,000
57	MENDATTE	720,442,000	690	0.466%	0.116%	409	0.634%	0.222%	6.00	0.36%	0.04%	24.65	0.586%	0.176%	0.55%	46,433,985	766,876,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)
V	KEC. ALLA	3,602,210,000														394,735,775	3,996,946,000
58	MATA ALLO	720,442,000	1207	0.815%	0.204%	753	1.167%	0.408%	4.15	0.25%	0.02%	37.53	0.893%	0.268%	0.90%	76,360,141	796,802,000
59	SUMILLAN	720,442,000	2331	1.574%	0.394%	377	0.584%	0.204%	3.81	0.23%	0.02%	32.91	0.783%	0.235%	0.86%	72,211,827	792,654,000
60	PANA	720,442,000	2600	1.756%	0.439%	1100	1.704%	0.597%	4.95	0.30%	0.03%	27.69	0.659%	0.198%	1.26%	106,568,215	827,010,000
61	TAULO	720,442,000	1246	0.841%	0.210%	877	1.359%	0.476%	4.04	0.24%	0.02%	39.56	0.941%	0.282%	0.99%	83,757,970	804,200,000
62	BOLANG	720,442,000	1486	1.003%	0.251%	380	0.589%	0.206%	4.15	0.25%	0.02%	25.19	0.599%	0.180%	0.66%	55,837,622	776,280,000
VI	KEC. BUNGIN	4,322,652,000														525,495,926	4,848,147,000
63	BUNGIN	720,442,000	1455	0.983%	0.246%	1131	1.752%	0.613%	86.00	5.17%	0.52%	38.58	0.918%	0.275%	1.65%	139,351,342	859,793,000
64	TALANG RILAU	720,442,000	485	0.328%	0.082%	488	0.756%	0.265%	20.53	1.23%	0.12%	51.90	1.235%	0.370%	0.84%	70,913,830	791,356,000
65	BARUKA	720,442,000	648	0.438%	0.109%	303	0.469%	0.164%	57.31	3.45%	0.34%	50.23	1.195%	0.358%	0.98%	82,421,362	802,863,000
66	BANUA	720,442,000	529	0.357%	0.089%	513	0.795%	0.278%	54.00	3.25%	0.32%	48.24	1.147%	0.344%	1.04%	87,459,784	807,902,000
67	SAWITO	720,442,000	701	0.473%	0.118%	617	0.956%	0.335%	12.50	0.75%	0.08%	50.67	1.205%	0.362%	0.89%	75,078,122	795,520,000
68	BULO	720,442,000	625	0.422%	0.106%	633	0.981%	0.343%	6.50	0.39%	0.04%	48.33	1.149%	0.345%	0.83%	70,271,486	790,713,000
VII	KEC. CENDANA	5,043,094,000														449,153,385	5,492,246,000
69	CENDANA	720,442,000	1576	1.064%	0.266%	1040	1.611%	0.564%	10.62	0.64%	0.06%	22.05	0.525%	0.157%	1.05%	88,714,409	809,156,000
70	TAULAN	720,442,000	2005	1.354%	0.338%	232	0.359%	0.126%	10.19	0.61%	0.06%	23.33	0.555%	0.166%	0.69%	58,399,239	778,841,000
71	PINANG	720,442,000	970	0.655%	0.164%	589	0.913%	0.319%	14.51	0.87%	0.09%	25.97	0.618%	0.185%	0.76%	63,775,847	784,218,000
72	MALALIN	720,442,000	708	0.478%	0.120%	322	0.499%	0.175%	11.50	0.69%	0.07%	39.96	0.951%	0.285%	0.65%	54,723,437	775,165,000
73	KARRANG	720,442,000	957	0.646%	0.162%	377	0.584%	0.204%	21.68	1.30%	0.13%	31.06	0.739%	0.222%	0.72%	60,589,072	781,031,000
74	LEBANG	720,442,000	1036	0.700%	0.175%	409	0.634%	0.222%	10.41	0.63%	0.06%	35.54	0.845%	0.254%	0.71%	60,161,282	780,603,000
75	PUNDI LEMO	720,442,000	1573	1.062%	0.266%	353	0.547%	0.191%	12.10	0.73%	0.07%	30.03	0.714%	0.214%	0.74%	62,790,098	783,232,000
VIII	KEC. CURIO	7,924,862,000														886,985,544	8,811,849,000
76	SENLEPOPOGAN	720,442,000	1435	0.969%	0.242%	257	0.398%	0.139%	22.36	1.34%	0.13%	48.84	1.162%	0.348%	0.86%	72,958,134	793,400,000
77	BUNTU BARANA	720,442,000	2425	1.638%	0.409%	682	1.057%	0.370%	25.32	1.52%	0.15%	38.45	0.915%	0.274%	1.21%	101,758,773	822,201,000
78	BUNTU PEMA	720,442,000	2065	1.394%	0.349%	702	1.088%	0.381%	8.34	0.50%	0.05%	52.27	1.243%	0.373%	1.15%	97,250,336	817,692,000
79	PAROMBEAN	720,442,000	1495	1.010%	0.252%	932	1.444%	0.505%	25.08	1.51%	0.15%	42.97	1.022%	0.307%	1.22%	102,552,510	822,995,000
80	TALLUNG URA	720,442,000	1092	0.737%	0.184%	466	0.722%	0.253%	24.51	1.47%	0.15%	41.21	0.980%	0.294%	0.88%	74,133,507	794,576,000
81	PEBALORAN	720,442,000	2001	1.351%	0.338%	580	0.899%	0.315%	15.04	0.90%	0.09%	37.84	0.900%	0.270%	1.01%	85,466,351	805,908,000
82	CURIO	720,442,000	1449	0.978%	0.245%	397	0.615%	0.215%	29.34	1.76%	0.18%	58.07	1.381%	0.414%	1.05%	88,667,625	809,110,000
83	MEKKALA	720,442,000	1009	0.681%	0.170%	272	0.421%	0.148%	7.10	0.43%	0.04%	52.88	1.258%	0.377%	0.74%	62,265,727	782,708,000
84	SUMBANG	720,442,000	1282	0.866%	0.216%	675	1.046%	0.366%	6.26	0.38%	0.04%	32.49	0.773%	0.232%	0.85%	71,895,723	792,338,000
85	MANDALAN	720,442,000	741	0.500%	0.125%	387	0.600%	0.210%	10.04	0.60%	0.06%	53.23	1.266%	0.380%	0.78%	65,418,177	785,860,000
86	SALASSA	720,442,000	926	0.625%	0.156%	318	0.493%	0.172%	13.45	0.81%	0.08%	49.90	1.187%	0.356%	0.77%	64,618,679	785,061,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)
IX	KEC. MALUA	5,043,094,000														360,224,404	5,403,320,000
87	BONTO	720,442,000	595	0.402%	0.100%	487	0.755%	0.264%	3.80	0.23%	0.02%	38.50	0.916%	0.275%	0.66%	55,874,583	776,317,000
88	TALLUNG TONDOK	720,442,000	1220	0.824%	0.206%	242	0.375%	0.131%	5.02	0.30%	0.03%	27.34	0.650%	0.195%	0.56%	47,468,117	767,910,000
89	RANTE MARIO	720,442,000	847	0.572%	0.143%	169	0.262%	0.092%	3.38	0.20%	0.02%	30.83	0.733%	0.220%	0.47%	40,082,535	760,525,000
90	TANGRU	720,442,000	1279	0.864%	0.216%	436	0.676%	0.236%	6.10	0.37%	0.04%	26.83	0.638%	0.191%	0.68%	57,427,597	777,870,000
91	KOLAI	720,442,000	822	0.555%	0.139%	403	0.624%	0.219%	3.81	0.23%	0.02%	36.68	0.872%	0.262%	0.64%	54,172,635	774,615,000
92	DULANG	720,442,000	986	0.666%	0.166%	270	0.418%	0.146%	7.40	0.44%	0.04%	36.14	0.860%	0.258%	0.62%	51,919,139	772,361,000
93	BUNTU BATUAN	720,442,000	752	0.508%	0.127%	378	0.586%	0.205%	5.60	0.34%	0.03%	37.24	0.886%	0.266%	0.63%	53,279,797	773,722,000
X	KEC. BUNTU BATU	5,763,536,000														808,759,735	6,572,294,000
94	PASUI	720,442,000	2270	1.533%	0.383%	1258	1.949%	0.682%	6.03	0.36%	0.04%	30.80	0.733%	0.220%	1.32%	111,515,431	831,957,000
95	ERAN BATU	720,442,000	1048	0.708%	0.177%	946	1.466%	0.513%	16.25	0.98%	0.10%	36.32	0.864%	0.259%	1.05%	88,341,495	808,783,000
96	LATIMOJONG	720,442,000	2416	1.631%	0.408%	1098	1.701%	0.595%	19.98	1.20%	0.12%	41.81	0.994%	0.298%	1.42%	119,982,288	840,424,000
97	BUNTU MONDONG	720,442,000	1637	1.105%	0.276%	651	1.009%	0.353%	20.21	1.22%	0.12%	36.46	0.867%	0.260%	1.01%	85,322,923	805,765,000
98	LEDAN	720,442,000	1489	1.006%	0.251%	413	0.640%	0.224%	25.43	1.53%	0.15%	37.19	0.885%	0.265%	0.89%	75,412,827	795,855,000
99	LUNJEN	720,442,000	1703	1.150%	0.288%	1126	1.745%	0.611%	7.48	0.45%	0.04%	34.26	0.815%	0.244%	1.19%	100,214,386	820,656,000
100	LANGDA	720,442,000	1241	0.838%	0.210%	1151	1.783%	0.624%	9.75	0.59%	0.06%	41.49	0.987%	0.296%	1.19%	100,282,997	820,725,000
101	POTOK ULIN	720,442,000	1678	1.133%	0.283%	1438	2.228%	0.780%	21.52	1.29%	0.13%	44.93	1.069%	0.321%	1.51%	127,687,389	848,129,000
XI	KEC. MASALLE	4,322,652,000														581,876,993	4,904,528,000
102	MASALLE	720,442,000	2788	1.883%	0.471%	933	1.446%	0.506%	16.75	1.01%	0.10%	33.41	0.795%	0.238%	1.32%	111,034,474	831,476,000
103	BATU KE'DE	720,442,000	2124	1.434%	0.359%	621	0.962%	0.337%	8.87	0.53%	0.05%	35.24	0.838%	0.251%	1.00%	84,399,226	804,841,000
104	MUNDAN	720,442,000	1777	1.200%	0.300%	1272	1.971%	0.690%	11.25	0.68%	0.07%	41.44	0.986%	0.296%	1.35%	114,190,400	834,632,000
105	BUNTU SARONG	720,442,000	2337	1.578%	0.395%	721	1.117%	0.391%	9.25	0.56%	0.06%	31.18	0.742%	0.222%	1.06%	89,759,535	810,202,000
106	RAMPUNAN	720,442,000	2028	1.369%	0.342%	824	1.277%	0.447%	13.00	0.78%	0.08%	41.61	0.990%	0.297%	1.16%	98,255,990	818,698,000
107	TONGKONAN BASSE	720,442,000	1751	1.182%	0.296%	666	1.032%	0.361%	9.23	0.55%	0.06%	40.07	0.953%	0.286%	1.00%	84,237,368	804,679,000
XII	KEC. BAROKO	3,602,210,000														356,328,438	3,958,539,000
108	BAROKO	720,442,000	2096	1.415%	0.354%	220	0.341%	0.119%	9.40	0.57%	0.06%	32.66	0.777%	0.233%	0.76%	64,365,786	784,808,000
109	BENTENG ALA	720,442,000	1738	1.174%	0.293%	153	0.237%	0.083%	8.93	0.54%	0.05%	39.31	0.935%	0.280%	0.71%	59,963,724	780,406,000
110	BENTENG ALLA UTARA	720,442,000	2265	1.530%	0.382%	403	0.624%	0.219%	11.14	0.67%	0.07%	39.13	0.931%	0.279%	0.95%	79,926,225	800,368,000
111	TONGKO	720,442,000	3237	2.186%	0.546%	599	0.928%	0.325%	9.41	0.57%	0.06%	28.94	0.688%	0.207%	1.13%	95,731,687	816,174,000
112	PATONGLOAN	720,442,000	1214	0.820%	0.205%	164	0.254%	0.089%	2.20	0.13%	0.01%	50.52	1.202%	0.361%	0.67%	56,341,016	776,783,000
Total		80,689,504,000	148,085	1.00	0.25	64,542	1.00	0.35	1,663	1.00	0.10	4,204	1.00	0.30	1.00	8,438,939,000	89,128,443,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	89,128,443,000 (c)
Pagu Alokasi Dasar	720,442,000 (d)
Total Pagu Alokasi Dasar	80,689,504,000 (e)
Pagu Bagian Formula	8,438,939,000 (f)
Jumlah Desa	112 (g)

Bobot	
JP	25% (h)
AK	35% (i)
LW	10% (j)
IKG	30% (k)

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO